



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	: 23 (Dua Puluh Tiga)
Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI
Hari, Tanggal	: Senin, 6 Februari 2023
Pukul	: 14.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Aria Bima/Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	: Pembahasan mengenai Evaluasi kinerja Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2022.
Hadir	: 1. 42 Orang dari 57 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Menteri Investasi/ Kepala BKPM RI, Bapak Bahliil Lahadalia; Beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/ Kepala BKPM RI pada pukul 14.46 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Senin, 6 Februari 2023, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Investasi/BKPM RI terkait Realisasi Investasi Tahun 2022 yang telah melebihi target RKP sebesar 100,6 persen.
2. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Investasi/BKPM RI untuk menjabarkan strategi yang akan dijalankan agar target investasi tahun 2023 sebesar Rp1.400 triliun dapat tercapai.
3. Komisi VI DPR RI mendukung Kementerian Investasi/BKPM RI untuk terus menjalankan kebijakan hilirisasi berbagai komoditas agar dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
4. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian Investasi/BKPM RI untuk terus melakukan sosialisasi secara masif terkait NIB kepada seluruh pelaku usaha yang ada di Indonesia.
5. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian Investasi/BKPM RI untuk menjabarkan secara detail peta jalan peluang investasi yang ada di Indonesia.
6. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian Investasi/BKPM RI untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait isu banyaknya tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia sehingga mengurangi peluang kerja masyarakat lokal.
7. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Investasi/BKPM RI untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

Catatan :

1. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian Investasi/BKPM RI untuk mereview secara mendalam terkait investasi oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) dalam pembangunan Meikarta.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.21 WIB.

**MENTERI INVESTASI/
KEPALA BKPM RI**

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

**ARIA BIMA
A-189**